



**PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**RINGKASAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

MARET, 2020



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T. atas berkat rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019 secara tepat waktu. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

RLPPD merupakan ringkasan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dengan ruang lingkup mencakup capaian kinerja makro, ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar, hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya, ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah dan inovasi daerah selama Tahun 2019.

Akhirnya, kami berharap agar RLPPD ini dapat menjadi bahan evaluasi yang efektif sebagai bentuk akuntabilitas terhadap penyelenggaraan urusan dan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka membangun Kabupaten Lombok Tengah yang beriman, sejahtera dan bermutu (Bersatu).

Praya, Maret 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Moh. Suhaili', is written over the printed text 'BUPATI LOMBOK TENGAH'.

BUPATI LOMBOK TENGAH

H. MOH. SUHAILI FT, SH

**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(RLPPD) KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019**

I. PENDAHULUAN

Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mewajibkan kepala daerah untuk menyusun ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (RLPPD). Dokumen ini adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

RLPPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 merupakan ringkasan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dengan ruang lingkup pembahasan mencakup capaian kinerja makro, ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar, hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya, ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah dan inovasi daerah selama Tahun 2019.

Data/ informasi yang disajikan dalam dokumen ini bersifat ringkas dan sebagian masih pada kondisi Tahun 2018. Hal ini disebabkan karena sampai dengan dokumen ini disusun, data/ informasi Tahun 2019 belum dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Rincian dan analisis data yang lebih lengkap dapat dilihat pada dokumen LPPD Tahun 2019.

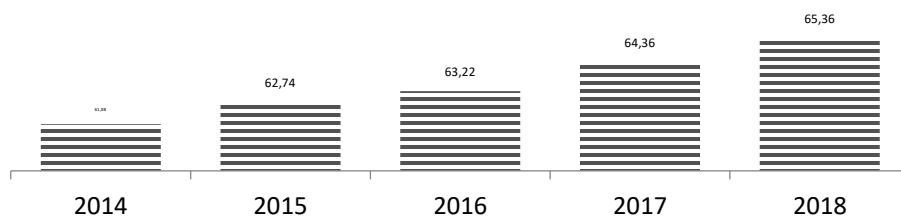
II. RINGKASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

II.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Lombok Tengah meningkat rata-rata 1,31 persen selama periode 2014-2018. Dalam kurun waktu lima tahun terjadi kenaikan IPM hingga 3,48 poin. Pada tahun 2018, IPM Lombok Tengah mencapai 65,36, (predikat: sedang) meningkat 1 poin dibanding tahun sebelumnya. Hal ini berarti IPM Lombok Tengah tumbuh 1,55 persen pada periode 2017-2018 dan merupakan pertumbuhan IPM tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018. Posisi IPM Kabupaten Lombok Tengah tahun 2018 meningkat dari posisi ke-9 menjadi ke-8 dari 10 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lombok Tengah 2014-2018



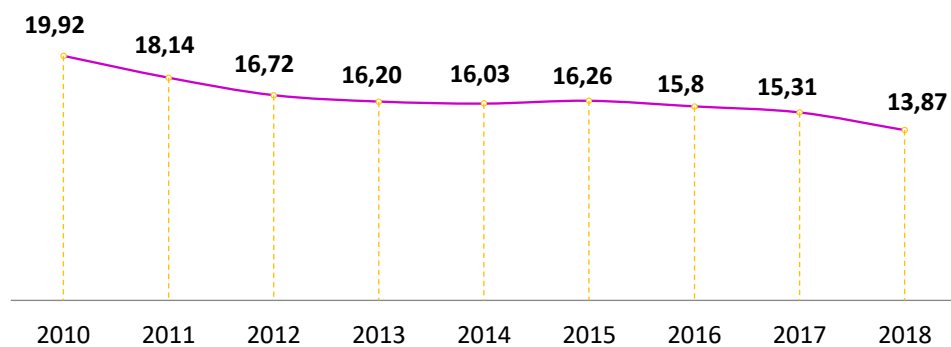
Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

B. Angka Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Lombok Tengah berada pada peringkat ke-4 terendah bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Persentase penduduk miskin Lombok Tengah juga lebih rendah dari persentase penduduk miskin Provinsi NTB..

Persentase penduduk miskin Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 -2018 adalah sebagai berikut:

Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010-2018



Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

C. Angka Pengangguran

Pada tahun 2018, TPT Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebesar 3,08 persen dari total penduduk angkatan kerja. Artinya, dari 100 orang angkatan kerja yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, terdapat 3 orang yang merupakan pengangguran. TPT tahun 2018 mengalami peningkatan 0,18 poin dibanding tahun 2017. Secara umum, tingkat pengangguran terbuka penduduk perempuan lebih tinggi daripada laki-laki.

TPT menurut Jenis Kelamin Tahun 2015, 2017-2018 (persen)

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total
2014	7,27	5,34	6,47
2015	9,92	4,32	7,42
2017	3,83	1,88	2,90
2018	2,72	3,49	3,08

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah (data diolah)

D. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pada tahun 2018, perekonomian Kabupaten Lombok Tengah mengalami perlambatan sebesar 3,17 persen. Hal ini disebabkan menurunnya produksi pertanian akibat musim kemarau dan menurunnya jasa transportasi karena jumlah wisatawan yang berkurang sebagai dampak gempa bumi 7 SR tahun 2018. Meskipun demikian, ekonomi Kabupaten Lombok Tengah didorong oleh adanya investasi pada pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun sektor swasta seperti pembangunan gedung kantor pemerintah, kampus politeknik, pengembangan kawasan KEK Mandalika, serta perbaikan saluran irigasi maupun jalan raya.

Laju Pertumbuhan Riil PDRB menurut Kategori Tahun 2016-2018 (persen)

Kategori	2016	2017*	2018**
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,86	6,38	2,22
B Pertambangan dan Penggalian	9,36	7,12	4,86
C Industri Pengolahan	3,19	4,57	1,47
D Pengadaan Listrik dan Gas	9,85	5,39	1,14
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,72	4,73	1,18
F Konstruksi	8,68	7,03	4,83
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,12	7,93	5,60
H Transportasi dan Pergudangan	5,74	6,14	(0,12)
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,54	7,01	2,04
J Informasi dan Komunikasi	8,62	8,02	5,07
K Jasa Keuangan dan Asuransi	11,11	10,54	6,87
L Real Estat	6,54	6,81	5,04
M,N Jasa Perusahaan	6,72	5,34	5,17
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,31	2,56	1,76
P Jasa Pendidikan	6,01	5,62	5,26
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,78	6,02	8,04
R,S,T,U Jasa lainnya	6,25	6,81	5,38
PDRB	5,65	6,42	3,17

* angka sementara

** angka sangat sementara

E. Pendapatan Perkapita

PDRB Per Kapita Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2018 mencapai 17,83 juta rupiah, artinya mengalami pertumbuhan sebesar 5,12 persen. Angka ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yang nilainya 16,96 juta rupiah. Jika dilihat PDRB per kapita masing-masing kategori, PDRB per kapita tertinggi pada kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 4,52 juta rupiah. Sebaliknya, kategori Pengadaan Listrik dan Gas memiliki PDRB per kapita terendah hanya Rp. 12.069,-.

PDRB Per Kapita menurut Kategori Tahun 2016-2018 (rupiah)

Kategori		2016	2017*	2018**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.871.889	4.232.542	4.516.356
B	Pertambangan dan Penggalan	592.886	663.006	711.334
C	Industri Pengolahan	759.297	811.160	831.522
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8.759	11.359	12.069
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19.243	20.510	20.589
F	Konstruksi	1.775.411	1.948.620	2.122.462
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.694.487	1.882.528	2.041.942
H	Transportasi dan Pergudangan	3.356.500	3.535.741	3.451.150
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	193.953	214.340	220.709
J	Informasi dan Komunikasi	217.474	241.426	254.008
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	301.695	344.371	376.170
L	Real Estat	573.790	622.552	670.158
M,N	Jasa Perusahaan	22.017	23.739	25.323
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	912.920	952.945	1.000.147
P	Jasa Pendidikan	690.833	748.082	799.796
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	342.857	367.926	408.988
R,S,T,U	Jasa lainnya	308.477	342.265	368.165
PDRB		15.642.489	16.963.112	17.830.887

* angka sementara

** angka sangat sementara

F. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Indeks Gini merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk menganalisa tingkat kesenjangan di suatu daerah. Nilai Gini Ratio yang terletak antara 0,50–0,70 menandakan pemerataan yang sangat timpang, sedangkan apabila nilainya terletak antara 0,36–0,49 menunjukkan kesenjangan sedang, apabila nilai Gini terletak diantara 0,20–0,35 dinyatakan pemerataan relatif tinggi (merata).

Gini Ratio Kabupaten Lombok Tengah dan Provinsi NTB Tahun 2015-2018

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018
1	Lombok Tengah	0,393	0,352	0,348	0,332
2	NTB	0,368	0,359	0,371	0,372

Kesenjangan pendapatan di Kabupaten Lombok cenderung bergerak kearah pemerataan. Pada tahun 2018 tingkat penurunan kesenjangan menunjukkan perbaikan yaitu mampu turun sebesar 0,015 dari tahun 2017 dan tingkat kesenjangan di Kabupaten Lombok Tengah masih di bawah gini ratio Provinsi NTB.

II.2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Urusan konkuren pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar pelaksanaan desentralisasi di daerah. Urusan konkuren dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi lagi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar. Dalam dokumen RLPPD ini, hanya akan disampaikan penjabaran tentang kinerja urusan wajib pelayanan dasar sebagai berikut :

A. URUSAN PENDIDIKAN

Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan Program Kegiatan yang telah dilaksanakan, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan tahun 2019 yaitu:

- a) PAUD terakreditasi A tahun 2019 sebesar 22,39 %, meningkat sebesar 19 % dari capaian tahun 2018 yaitu sebesar 3,39%;
- b) APK PAUD tahun 2019 sebesar 78,15%, meningkat sebesar 10,04 % dari capaian tahun 2018 yaitu sebesar 68,11%;
- c) Angka melek huruf usia 15-55 tahun, tahun 2019 sebesar 89,87%, meningkat sebesar 0,53 % dari capaian tahun 2018 yaitu sebesar 89,34%;
- d) SD terakreditasi A tahun 2019 sebesar 5,79 %, meningkat sebesar 0,33 % dari capaian tahun 2018 yaitu sebesar 5,46%;
- e) SMP terakreditasi A tahun 2019 sebesar 9,50 %, meningkat sebesar 0,56 % dari capaian tahun 2018 yaitu sebesar 8,94%;
- f) APK SD/MI/Paket A tahun 2019 sebesar 110,70 %, meningkat sebesar 1,5 % dari capaian tahun 2018 yaitu sebesar 109,20%;
- g) APK SMP/MTs/Paket B tahun 2019 sebesar 103,35%, menurun sebesar 3,61% dari capaian tahun 2018 yaitu sebesar 106,96 %;
- h) APM SD/MI/Paket A tahun 2019 sebesar 98,89 %, menurun sebesar 1,09 % dari capaian tahun 2018 yaitu sebesar 99,98%;

- i) APM SMP/MTs/Paket B tahun 2019 sebesar 98,81%, meningkat sebesar 0,5% dari capaian tahun 2018 yaitu sebesar 98,31 %;
- j) ABK terlayani pendidikan inklusif tahun 2019 sebesar 79,42%, menurun sebesar 7,79 % dari capaian tahun 2018 yaitu sebesar 87,21 %;
- k) PTK PAUD bersertifikasi tahun 2019 sebesar 96,58%, meningkat sebesar 7,79 % dari capaian tahun 2018 yaitu sebesar 90,91 %;
- l) PTK SD bersertifikasi tahun 2019 sebesar 90,46%, menurun sebesar 3,14 % dari capaian tahun 2018 yaitu sebesar 93,60 %;
- m) PTK SMP bersertifikasi tahun 2019 sebesar 90,36%, meningkat sebesar 1,06% dari capaian tahun 2018 yaitu sebesar 88,67 %.

B. URUSAN KESEHATAN

urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Praya. Berdasarkan Program Kegiatan yang telah dilaksanakan, capaian kinerja penyelenggaraan urusan kesehatan tahun 2019 yaitu:

DINAS KESEHATAN

- a. Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan tahun 2019 sebesar 95,44%, meningkat sebesar 1,1% dari capaian tahun 2018 sebesar 94,34%
- b. Komplikasi kebidanan yang ditangani tahun 2019 sebesar 124,89 %, meningkat 1,11% dari capaian tahun 2018 sebesar 123,78%
- c. Pelayanan ibu nifas tahun 2019 sebesar 96,27%, meningkat 0,8% dari capaian tahun 2018 sebesar 95,47%
- d. Neonatal dengan komplikasi yang ditangani tahun 2019 sebesar 67,36%, meningkat sebesar 4,53% dari tahun 2018 sebesar 71,89%;
- e. Kunjungan bayi tahun 2019 sebesar 103,42% , meningkat sebesar 4,16% dari tahun 2018 sebesar 99,26%
- f. Kematian ibu tahun 2019 sebanyak 30 kasus meningkat 6 kasus dari capaian tahun 2018 sebanyak 24 kasus
- g. ASI eksklusif tahun 2019 sebesar 93,1%, menurun 0,2% dari capaian 2018 sebesar 93,3%;
- h. Jumlah kasus gizi buruk tahun 2019 sebanyak 31 kasus.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA

- a. Tipe akreditasi RSUD Praya tahun 2019 terakreditasi Madya sama dengan capaian tahun 2018 terakreditasi Madya;
- b. Level layanan trauma center meliputi traumatologi dan ortopedi level III tahun 2019 TC level V. Kondisi ini meningkat dari capaian tahun 2018 yang masih dalam tahap persiapan peningkatan pelayanan TC;

- c. Presentase capaian kinerja operasional rumah sakit tahun 2019 sebesar 100% sama dengan capaian tahun 2018 sebesar 100%.

C. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan Program Kegiatan yang telah dilaksanakan, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2019 antara lain:

- a) Cakupan layanan irigasi tahun 2019 sebesar 13,12 %, sama dengan capaian tahun 2018 yaitu sebesar 13,12%
- b) Presentase jalan dalam kondisi mantap tahun 2019 sebesar 67,68%, menurun sebesar 2,94 % dari capaian tahun 2018 yaitu sebesar 70,62%
- c) Presentase rumah tangga yang terlayani air bersih tahun 2019 sebesar 90,18 %, meningkat sebesar 6,8 % dari capaian tahun 2018 yaitu sebesar 83,38%
- d) Presentase ketaatan terhadap RTRW tahun 2019 yaitu sebesar 81,40 meningkat sebesar 1,08 % dari capaian tahun 2018 yaitu sebesar 80,32 %.

D. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Lombok Tengah. Berdasarkan Program Kegiatan yang telah dilaksanakan, capaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan perukiman tahun 2019 antara lain:

- a) Capaian indikator kinerja jumlah *Backlog* rumah tidak layak huni Tahun 2019 sebesar 65.450 unit berkurang sebanyak 1.089 unit dari capaian Tahun 2018 sebesar 67.349 unit ;
- b) Capaian indikator kinerja panjang jalan lingkungan yang terbangun sampai dengan tahun 2019 sebesar 198.749 m, bertambah sebesar 72.288 m dari capaian tahun 2018 yaitu sebesar 126.461 m;
- c) Capaian indikator kinerja panjang saluran drainase dalam kota praya dalam kondisi baik tahun 2019 sepanjang 129.627 m, bertambah sepanjang 9.050 m dari capaian tahun 2018 yaitu sepanjang 120.622 m;
- d) Capaian indikator kinerja jumlah penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2019 sebanyak 1.146 titik, bertambah sebanyak 18 titik dari capaian tahun 2018 yaitu sebanyak 1.128 titik;
- e) Capaian indikator kinerja jumlah ruang terbuka hijau (RTH) yang terpelihara dengan baik tahun 2019 seluas 1.372.045 Ha, bertambah seluas 0.45 Ha dari capaian tahun 2018 yaitu seluas 1.372 Ha;

- f) Capaian indikator kinerja luas kawasan kumuh perkotaan tahun 2019 seluas 53.12 Ha berkurang seluas 7.59 Ha dari capaian tahun 2018 yaitu seluas 60.71 Ha.

E. URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan Program Kegiatan yang telah dilaksanakan, capaian kinerja penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tahun 2019 antara lain:

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- a. Angka pelanggaran perda dan perkara tahun 2019 sebanyak 201 kasus;
- b. Persentase penanganan gangguan trantibum tahun 2019 sebesar 100% , sama dengan capaian tahun 2018 sebesar 100%;
- c. Presentase pos keamanan lingkungan yang aktif tahun 2019 sebesar 57%.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- a. Capaian indikator kinerja Desa Tanggung Bencana (DESTANA) tahun 2019 sebanyak: 23 desa, bertambah 3 desa dari kondisi tahun 2018 sebanyak 20 desa;
- b. Capaian indikator kinerja presentase korban bencana yang tertangani pada tahun 2019 adalah 100% sama dengan capaian kinerja tahun 2018;
- c. Capaian indikator kinerja kecepatan dan ketepatan waktu penanganan kebakaran tahun 2019 adalah 15 menit sama dengan capaian tahun 2018.

F. URUSAN SOSIAL

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan Program Kegiatan yang telah dilaksanakan, capaian kinerja penyelenggaraan urusan sosial tahun 2019 antara lain:

- a. Penanganan PMKS tahun 2019 sebesar 40,37%, meningkat sebesar 12,1% dari capaian tahun 2018 yaitu sebesar 28,27%
- b. Lembaga sosial yang aktif tahun 2019 sebesar 52,77 % , meningkat sebesar 19,37% dari capaian tahun 2018 yaitu sebesar 33,4%

II.3. EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EPPD)

A. NILAI EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (EPPD)

Nilai EPPD ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) setiap tahun. Hasil EPPD akan menjadi bahan penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Nilai EPPD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama tiga tahun terakhir selalu mendapat predikat “sangat tinggi” yang berarti penyelenggaraan urusan pemerintahan setiap tahun telah menghasilkan kinerja yang baik.

Nilai EKPPD Kab. Lombok Tengah 2016-2018

NO	TAHUN	NILAI EKPPD	PREDIKAT	DOK. PENDUKUNG
1	2016	3,1254	Sangat Tinggi	LKJIP BPKP Perwakilan NTB
2	2017	3,0332	Sangat Tinggi	Tahun 2018, Halaman 76-77
3	2018	3,0738	Sangat Tinggi	Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Atas LPPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor LHE-487/PW23/3/2019, Tanggal: 30 Agustus 2019

Ket: Nilai EPPD Tahun 2019 akan ditetapkan pada pertengahan Tahun 2020.

Berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri, beberapa permasalahan utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Lombok Tengah adalah:

1. Sebagian besar OPD tidak memiliki profil atau statistik sektoral sesuai indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab sesuai Tupoksi yang dimiliki. Akibatnya sangat sulit untuk melakukan pengukuran dan akuntabilitas hasil kinerja yang dicapai.
2. Kurangnya kegiatan peningkatan kapasitas terhadap pejabat/ pegawai dalam penyelenggaraan kinerja urusan pemerintahan.
3. Kualitas dokumentasi dan pengarsipan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah cukup rendah;
4. Kurangnya harmonisasi/ keselarasan antar dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program/ kegiatan di daerah.

B. NILAI OPINI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian *intern*.

Pada Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke- 7 dari BPK secara beruntun sejak tahun 2012. Pendukung prestasi Lombok Tengah dalam mencapai 7 kali opini WTP secara berturut-turut antara lain:

1. Komitmen untuk menyelesaikan seluruh temuan/ tindak lanjut dari hasil pemeriksaan keuangan daerah;
2. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah. Contoh : melaksanakan verifikasi dan validasi data aset daerah;
3. Koordinasi dan konsultasi intensif secara internal dan eksternal pemerintah daerah. Contoh adanya pendampingan intensif terhadap pejabat/pegawai pengelola keuangan pada seluruh OPD;
4. Meningkatkan peran aparat pengawas internal pemerintah (APIP) Inspektorat terutama dalam proses audit regular dan reviu atas LKPD;
5. Melakukan review berjenjang dalam proses penyusunan APBD mulai dari proses musrenbang, penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan RKA, pembahasan Raperda APBD, evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD serta Raperkada penjabaran APBD Kabupaten/Kota dengan merujuk pada Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Penerapan / implementasi reformasi birokrasi didaerah;
7. Penyelenggaraan SAKIP (sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinah) di daerah;
8. Upaya penyusunan dokumen ASB (analisis standar belanja).
9. Inovasi penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan denga manajemen keuangan seperti:
 - Aplikasi "SILAK";
 - Aplikasi "SIMDA";
 - Aplikasi "SIDATU";

II.4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menjadi sebuah instrumen untuk menilai tingkat kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pembangunan di daerahnya. Secara umum pendapatan daerah mencerminkan *performance* perekonomian suatu daerah yang bisa menggambarkan kemampuan finansial, tingkat investasi dan *income* perkapita di daerah.

Adapun target pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.2,161,842,234,622.38-. Dari target pendapatan daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mampu mencapai realisasi dari keseluruhan sumber pendapatan daerah sebesar Rp.2.119.200.350.667,21 atau 98,03%. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tabel berikut ini:

**Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Lombok Tengah
Tahun Anggaran 2019**

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	%
4	PENDAPATAN DAERAH	2.161.842.234.622,38	2.119.200.350.667,21	98,03
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	203.099.854.513,38	204.508.588.776,21	100,69
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	78.480.915.000,00	77.650.264.291,17	98,94
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	22.797.547.000,00	14.649.920.891,00	64,26
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.173.070.056,38	8.901.639.456,38	97,04
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	92.648.322.457,00	103.306.764.137,66	111,50
4.2.	DANA PERIMBANGAN	1.571.801.664.000,00	1.537.058.189.781,00	97,79
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	84.211.432.000,00	72.767.261.200,00	86,41
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.028.786.865.000,00	1.032.033.870.000,00	100,32
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	458.803.367.000,00	432.257.058.581,00	94,21
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	386.940.716.109,00	377.633.572.110,00	97,59
4.3.1.	Pendapatan Hibah	96.653.011.000,00	69.573.404.986,00	71,98
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	82.526.493.109,00	100.077.991.424,00	121,27
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	207.459.593.000,00	207.459.593.000,00	100,00
4.3.6.	Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga	301.619.000,00	522.582.700,00	173,26

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	%
	JUMLAH PENDAPATAN	2.161.842.234.622,38	2.119.200.350.667,21	98,03
5	BELANJA DAERAH	2.279.133.654.703,50	2.171.915.901.434,96	95,30
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.217.319.704.372,14	1.190.932.327.574,65	97,83
5.1.1.	Belanja Pegawai	846.993.089.350,14	825.067.591.213,00	97,41
5.1.2.	Belanja Bunga	2.186.051.822,00	1.415.319.751,00	64,74
5.1.4.	Belanja Hibah	42.787.300.000,00	42.387.258.000,00	99,07
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	6.561.191.000,00	6.446.921.364,00	98,26
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	10.127.847.000,00	6.953.411.442,65	68,66
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ Pemerintahan Desa dan Partai Politik	307.664.225.200,00	307.661.858.054,00	100,00
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	999.967.750,00	100,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.061.813.950.331,36	980.983.573.860,31	92,39
5.2.1.	Belanja Pegawai	56.490.680.500,00	49.546.277.921,00	87,71
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	584.143.464.323,30	526.034.760.169,69	90,05
5.2.3.	Belanja Modal	421.179.805.508,06	405.402.535.769,62	96,25
	JUMLAH BELANJA	2.279.133.654.703,50	2.171.915.901.434,96	95,30
	SURPLUS/(DEFISIT)	(117.291.420.081,12)	(52.715.550.767,75)	44,94
6,1	PEMBIAYAAN DAERAH	127.127.668.821,12	117.436.026.499,59	92,38
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	127.127.668.821,12	117.436.026.499,59	92,38
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	58.358.151.321,12	58.370.394.699,59	100,02
6.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	68.769.517.500,00	58.990.531.800,00	85,78
6.1.7.	Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah	0,00	75.100.000,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	127.127.668.821,12	117.436.026.499,59	92,38
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.836.248.740,00	9.836.248.740,00	100,00
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.836.248.740,00	9.836.248.740,00	100,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.836.248.740,00	9.836.248.740,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	117.291.420.081,12	107.599.777.759,59	91,74
6,3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) Sebelum Koreksi	0,00	54.884.226.991,84	0,00
	Koreksi SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
6,3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	54.884.226.991,84	0,00

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah hampir mencapai target sebagaimana amanat APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019.

Target pendapatan yang belum tercapai disebabkan karena target Pendapatan Retribusi Daerah belum dapat terealisasi secara optimal. Hal ini terutama terjadi pada Retribusi pengendalian menara telekomunikasi mencapai 13.44%, Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum mencapai 17.68%, Retribusi Pelayanan Pasar mencapai 17.20,%, Retribusi Rumah Potong Hewan mencapai 29.97,% dan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang tidak terealisasi di tahun 2019.

Permasalahan dalam pengelolaan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2019, antara lain:

- a. Pengelolaan administrasi Pendapatan Asli Daerah terutama terkait pengelolaan retribusi daerah pada SKPD relatif masih belum terlaksana dengan tertib.
- b. Masih rendahnya kinerja pengelola retribusi daerah karena masih kurangnya kuantitas dan kualitas pengawasan
- c. Belum diterapkannya penegakan hukum (*law inforcement*) terhadap wajib pajak atau wajib retribusi yang tidak patuh membayar pajak/retribusi daerah.
- d. Penetapan peraturan yang mengatur besarnya pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah baik dari dana perimbangan maupun bagi hasil pajak provinsi sering terlambat diperoleh, sehingga penetapan target pada APBD belum semuanya mencerminkan besaran sesuai dengan peraturan yang menetapkannya.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

Penganggaran Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.2.279,133,654,703.50 dengan realiasi sebesar Rp.2.171.915.901.434,96 atau sebesar 95,30%.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2019 secara lebih rinci tertuang pada tabel berikut ini:

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

KODE	URAIAN	ANGGARANSETELAH PERUBAHAN(Rp.)	REALISASI	
			Rp.	%
5	BELANJA DAERAH			
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.217.319.704.372,14	1.190.932.327.574,65	97,83
5.1.1.	Belanja Pegawai	846.993.089.350,14	825.067.591.213,00	97,41
5.1.3.	Belanja Bunga	2.186.051.822,00	1.415.319.751,00	64,74
5.1.4.	Belanja Hibah	42.787.300.000,00	42.387.258.000,00	99,07

KODE	URAIAN	ANGGARANSETELAH PERUBAHAN(Rp.)	REALISASI	
			Rp.	%
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	6.561.191.000,00	6.446.921.364,00	98,26
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	10.127.847.000,00	6.953.411.442,65	68,66
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik	307.664.225.200,00	307.661.858.054,00	100,00
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	999.967.750,00	100,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.061.813.950.331,36	980.983.573.860,31	92,39
5.2.1.	Belanja Pegawai	56.490.680.500,00	49.546.277.921,00	87,71
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	584.143.464.323,30	526.034.760.169,69	90,05
5.2.3.	Belanja Modal	421.179.805.508,06	405.402.535.769,62	96,25
	JUMLAH BELANJA	2.279.133.654.703,50	2.171.915.901.434,96	95,30

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan realisasi belanja daerah hampir mencapai target sebagaimana amanat APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019.

C. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penganggaran untuk Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah. Adapun Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.117.436.026.499,59 atau 92,38% dari anggaran sebesar Rp.127.127.668.821,12.

Realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp.107.599.777.759,59 atau 91,74% dari anggaran Pembiayaan Netto sebesar Rp.117.291.420.081,12.

Adapun target dan realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019 secara lebih rinci sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI	
			Rp.	%
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	127.127.668.821,12	117.436.026.499,59	92,38
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	58.358.151.321,12	58.370.394.699,59	100,02
06.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	68.769.517.500,00	58.990.531.800,00	85,78
06.01.05	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	0,00	75.100.000,00	0,00
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	9.836.248.740,00	9.836.248.740,00	100,00
06.02.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.836.248.740,00	9.836.248.740,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	117.291.420.081,12	107.599.777.759,59	91,74

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

Realisasi penerimaan pembiayaan berupa penerimaan pinjaman daerah senilai Rp. 79.959.000.000,00 atau 87,77% yang digunakan untuk Pembangunan Pasar Jelejok. Sedangkan penerimaan kembali investasi non permanen bersumber dari penerimaan kembali dana bergulir penguatan permodalan koperasi.

III. PENUTUP

APBD Tahun Anggaran 2019 dapat direalisasi sesuai dengan perencanaan dan strategi pembangunan yang telah ditentukan. Berdasarkan pengukuran indikator pelaksanaan pembangunan pada tahun 2019 menunjukkan adanya peningkatan secara bertahap berbagai aspek pembangunan seperti peningkatan jumlah mutu fasilitas sarana dan prasarana, pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan pegawai, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, serta peningkatan kinerja aparat pemerintah.

Pencapaian kinerja pada tahun 2019 secara keseluruhan merupakan hasil ikhtiar dan kerja sama yang harmonis dari seluruh komponen pemerintahan dan unsur-unsur kemasyarakatan. Partisipasi aktif seluruh pihak yang dilandasi semangat persatuan dalam membangun daerah sangat penting untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal tersebut juga menjadi faktor penentu keberhasilan upaya akselerasi pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Lombok Tengah yang “BERSATU” (Beriman, sejahtera, dan bermutu).

